

196-697-3-PB

by Radja Publika

Submission date: 29-Mar-2023 02:51AM (UTC-0400)

Submission ID: 2048579224

File name: 196-697-3-PB.docx (123.27K)

Word count: 4785

Character count: 35743

**HUBUNGAN TINGKAT KEMISKINAN DENGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PERIKANAN TANGKAP PADA KAWASAN MINAPOLITAN**

**POVERTY RELATIONSHIP WITH THE UTILIZATION OF CAPTURE FISHERIES
RESOURCES IN THE MINAPOLITAN AREA**

Jamilah*, Mawardati

Program Studi Agribisnis, Universitas Malikussaleh

*Penulis korespondensi: jamilah@unimal.ac.id

ABSTRACT

The high-pitched impoverishment proportion of coastwise communities demonstrates that the potentiality of eastbound Aceh rule fisheries processes cannot be maximally utilized. For this reason, the administration has deliberate the exploitation of the eastbound sea-coast of Aceh responsibility nailed down the Minapolitan Program. The contemplate directs to psychoanalyse the communication of impoverishment levels of fishermen with the employment of appropriate fisheries processes in the Minapolitan Region. The disposition euphemistic pre-owned is a take the measure of disposition with an interpretative drawing near to interpretative research. steadfastness of territories is finished purposively, videlicet eastbound Aceh rule as a minapolitan environment of appropriate fisheries supported on the determination of the diplomatic negotiations of ocean-going and Fisheries of the commonwealth of Indonesia character 35 / KEPMEN-KP / 2013. The consequences of the contemplate established that eastbound Aceh rule has appreciable fisheries potentiality as a community economical thrust and buoy be highly-developed in an coeducational procedure in the Minapolitan area, on the other hand the commensurate of employment of appropriate fisheries processes has not been maximized, by oneself 27,659. 5 lashings or 10. 16% of the totality sustainable potentiality of Aceh Province. It is estimated that 10,053 fishermen or 76. 07% of fishermen do not chalk up appropriate fleets. search creation is 27,474. 3 lashings / gathering and the intermediate creation of fishermen is 6. 67 kg / day. The donation of fishermen's resource in buzz session family be in want of is Rp. 13,340 / capita / day after day or Rp. 346,840 / capita / month. Fishermen's resource is farther down the impoverishment occupation and waterfalls into the worst category.

Keywords: Poverty, fishermen, utilization, resources.

ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa potensi sumber daya ikan di wilayah Aceh Timur belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pembangunan kawasan pesisir timur provinsi Aceh melalui program Minapolitan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan nelayan dan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan Minapolitan. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan explanatory research. Kawasan tersebut sengaja ditetapkan sebagai kawasan Aceh Timur sebagai kawasan tiang tambang untuk perikanan tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Hasil kajian menunjukkan Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai penggerak perekonomian daerah dan dapat dikembangkan secara integral di kawasan Minapolitan, namun tingkat eksploitasi

sumber daya ikan hasil tangkapan belum maksimal, hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Provinsi Aceh. Diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 persen nelayan tidak memiliki armada penangkapan ikan. Produksi ikan 27.474,3 ton/tahun dan rata-rata produksi ikan nelayan 6,67 kg/hari. Pajak penghasilan nelayan untuk kebutuhan rumah tangga adalah Rp13.340/penduduk/hari atau Rp. 346.840/penduduk/bulan. Pendapatan nelayan berada di bawah garis kemiskinan dan termasuk kategori termiskin.

Kata kunci: Kemiskinan, nelayan, pemanfaatan, sumberdaya.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengentasan kemiskinan merupakan isu utama pembangunan ekonomi di Aceh. Namun kemiskinan nelayan Aceh yang mencerminkan keprihatinan, permasalahan dalam negeri, keterbatasan sumber daya ikan dan aspirasi nelayan Aceh masih belum tergambarkan dengan jelas, bahkan kebijakan anti kemiskinan pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan para nelayan yang menahan mereka tertangkap. di jurang Kemiskinan.

Kabupaten Aceh Timur memiliki garis pantai sepanjang 161 kilometer dan 14 wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai penggerak perekonomian daerah apabila dapat dikembangkan secara terpadu di kawasan Minapolitan. 14 kabupaten pesisir Aceh Timur dihuni oleh 250.833 jiwa atau 71,79 persen penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal: 2 Juli 2013 tentang penetapan kawasan Aceh Timur sebagai kawasan minapol penangkapan ikan dan kawasan minapol budidaya.

Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap adalah kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis kegiatan penangkapan ikan yang dikembangkan bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut (KKP, 2011).). Salah satu program perikanan bubu Minapoli ditujukan untuk pengembangan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya ikan bubu secara efisien dan efektif serta pengembangan sumber daya ikan. Implementasinya didasarkan pada peluang penangkapan ikan dan pemetaan masalah penangkapan ikan.

Perikanan tangkap dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur yang merupakan segitiga pertumbuhan Indonesia-Thailand-Malaysia Cooperation (IMT-GT) baik dari segi ketersediaan sumber daya ikan, infrastruktur maupun pembukaan pasar ekspor hasil perikanan. Namun, sumber daya tersebut tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Padahal penggunaan sumber daya tersebut menunjukkan kontribusi yang penting bagi daerah. Pada tahun 2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur mencapai 45,97 persen atau Rp. 3.899.883,8 juta), namun sebagian masyarakat, khususnya nelayan, masih belum mampu memanfaatkan sebagian besar sumber daya tersebut. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Aceh Timur sebanyak 61.630 jiwa atau 15,06 persen, dan sebagian besar tinggal di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan Rp. 350.186/penduduk/bulan (BPS Kabupaten Aceh Timur, 2017). Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir menunjukkan bahwa masyarakat pesisir (nelayan) memiliki akses yang terbatas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ketidakpastian pendapatan nelayan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan modal komersial memerlukan perhatian khusus dari otoritas setempat.

Di wilayah Aceh Timur, sebagian besar nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, nelayan, pengolah ikan kecil dan pedagang kecil karena keterbatasan kemampuan investasi. Nelayan skala kecil hanya dapat mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir, dimana hasil tangkapan terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan kualitas sumber daya pesisir. Tangkapan (ikan) yang sedikit rusak dapat melemahkan posisi negosiasi mereka dalam perjanjian penjualan. Selain itu, hubungan eksploitatif antara pemilik modal, pekerja dan nelayan, serta operasi penangkapan ikan yang musiman dan genting mempersulit masyarakat pesisir yang miskin untuk bertahan dari kemiskinan dan hutang pemilik kapal. Berbagai tata cara, qanun, dan peraturan lain yang mengatur lingkungan hidup, termasuk pesisir, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikemukakan oleh Sugiharto et al. (2013) menemukan bahwa jebak kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya terkait dengan fluktuasi musim penangkapan ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal dan akses, jaringan perdagangan ikan yang mengeksploitasi nelayan sebagai produsen, tetapi juga karena efek negatif dari modernisasi perikanan yang mendorong pengurasan sumber daya alam laut secara berlebihan.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi dan diakibatkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Kekayaan potensi sumber daya alam laut dan perikanan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Program Minapolitan bertujuan untuk mengembangkan perikanan secara bertahap, meningkatkan pengaruh nelayan melalui peningkatan pendapatan dan kekayaan, serta pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan, adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Nama kabupaten tersebut memang disengaja yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai Kawasan Tambang Polandia Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35/KEPMEN-KP/2013. .

Adapun narasumber yang dijadikan sampel penelitian adalah para nelayan nelayan pemburu Kabupaten Aceh Timur yang terbagi menjadi tiga kelompok nelayan, yaitu: (1) nelayan dengan perahu bermotor, (2) nelayan dengan perahu tidak bermotor, dan (3) anak buah kapal (ABK). Prosedur pengambilan sampel nelayan adalah simple random sampling, yaitu. pengambilan sampel sederhana.

Penelitian ini menggunakan metode explanatory research dengan metode survey. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang direkam adalah data primer dan data sekunder.

Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan nelayan dianalisis untuk mengetahui tingkat optimal kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang terbatas, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menjadi deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan nelayan ditandai dengan variasi pendapatan, pemborosan konsumsi, pendidikan yang rendah dan kesempatan kerja keluarga (istri dan anak) yang kurang dimanfaatkan. Kemiskinan nelayan lebih dekat dengan kemiskinan struktural daripada kemiskinan fisik (absolut). Indikator kemiskinan industri perikanan adalah: 1) penguasaan aset produktif nelayan yaitu berdasarkan penguasaan alat tangkap, 2) struktur pengeluaran rumah tangga, baik untuk makanan maupun non makanan, (3) sumber pendapatan rumah tangga nelayan dari kegiatan menangkap ikan atau penangkapan ikan sekitar 60 persen dan kegiatan non perikanan sekitar 23 persen; dan (4) kegiatan penangkapan ikan dan non penangkapan ikan (Indraningsih dan Noekman, 1995).

Rumah tangga nelayan menghadapi masalah kompleks terkait dengan produksi, konsumsi, dan alokasi tenaga kerja. Akibatnya, pandangan sepihak terhadap perilaku ekonomi nelayan sangat lemah (Fauzi dan Anna, 2002). Masalah di wilayah pesisir adalah mis. (1) Pemanfaatan sumber daya melebihi kapasitas dan daya tampung, (2) Persaingan antar skala industri, (3) Pembagian hasil tidak merata dan adil karena akses perusahaan perikanan yang berbeda, (4) Kebijakan teritorial wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga . banyak daerah terdegradasi, (5) investasi berlebihan di beberapa sektor sementara investasi di sektor lain terbatas, dan (6) kemiskinan struktural, terutama di desa pesisir/nelayan (Mahomet, 2002).

Terdapat indikasi bahwa potensi sumber daya ikan yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh yang tercermin dari lingkungan hidup yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang terbatas dan pendidikan yang minim. Kondisi ini menjadi penghambat pembangunan ekonomi daerah. Ekonomi perikanan yang berkembang di Kabupaten Aceh Timur adalah ekonomi tradisional atau skala kecil. Industri perikanan ini ditandai dengan penggunaan alat sederhana seperti perahu tidak bermotor, alat tangkap sederhana dan terbatasnya wilayah penangkapan ikan di perairan Selat Malaka yang paling jauh dari daerah penangkapan ikan. Bahkan, beberapa kapal berlayar ke Laut Andaman. Dari 1.314 unit armada yang beroperasi di sektor perikanan tangkap, sebanyak 687 unit berukuran kurang dari 5 GT (gross tonnage) atau 52,2% kapal bermesin (Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Akibatnya, ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu lagi beroperasi, sehingga wilayah penangkapan ikan terkonsentrasi di perairan kurang dari 4 mil laut. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan. Tingkat pendapatan nelayan dalam pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas perairan pesisir dan laut yang dapat diakses, intensitas pemanfaatan modal kerja, perbaikan dan stabilitas harga ikan, dan penyebaran informasi pasar. (Muhammad, 2002).

Potret kemiskinan nelayan mencerminkan keterbatasan nelayan dalam mencari ikan, media penangkapan ikan dan peluang untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Sumber pendapatan utama rumah tangga nelayan adalah dari penjualan ikan yang sangat bergantung pada musim dan jumlah ikan yang ditangkap. Kegiatan nelayan terutama meliputi penangkapan ikan, seperti perbaikan alat tangkap (jaring), pengolahan ikan, pengangkutan ikan dan pemasaran. Kegiatan lainnya adalah kegiatan komersial dan non pertanian. Namun, sebagian besar nelayan hanya bergantung pada penangkapan ikan.

Rendahnya pendapatan nelayan karena hasil tangkapan ditentukan oleh angin dan perubahan sistem bagi hasil. Ikatan mereka dengan pemilik kapal membuat nelayan terilit hutang dan terjebak dalam kemiskinan (Jamilah, 2015). Apabila perusahaan perikanan memiliki kapal dengan jumlah nelayan 20-25 orang, dengan waktu penangkapan ikan 3 hari (3 x 24 jam), maka pendapatan nelayan ditentukan dengan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal. Sistem bagi hasil merupakan salah satu aspek kelembagaan produksi berupa perjanjian bagi hasil yang diterapkan bersama dengan perjanjian lain yang mengikat antara nelayan dan pemilik kapal/perahu.

Tabel 1 Sistem Bagi Hasil pada Usaha Penangkapan Ikan

No.	Distribusi Pekerjaan	Jumlah Pekerja (Orang)	Pembagian Hasil (Bagian)
1.	Pawang	1	5,0
2.	Wakil Pawang	1	4,0
3.	Tukang Lampu	2	3,0
4.	Masnage	1	2,5
5.	Anak Buah Kapal (ABK)	15	1,0
Jumlah		20	15,5

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Ikan yang ditangkap dijual dengan penyangga bangku. Touke Bench adalah stock owner atau orang yang ditunjuk oleh stock owner untuk mengelola kapal. Jika bank trip tidak memiliki kapal, maka bank trip akan membayar biaya operasional penangkapan ikan sedangkan pemilik ekuitas hanya mengurus kapal dan kesempatan menangkap ikan. Hasil penjualan ikan dikurangi menjadi Rp dengan harga 100 liter solar. 6.500/liter 650.000 Rp. Makan 5 hari untuk 20 orang Rp 1.000.000, Pemakaian 50 kotak es (1 bak @ Rp 25.000/bak) Rp 1.250.000. Biaya bahan bakar, makan dan es ditanggung ulat, sedangkan rokok ditanggung nelayan. Setelah dikurangi biaya bahan bakar, hasil penjualan ikan dipotong 10% untuk pemilik modal dan sisanya dibagikan 40% untuk perjalanan bank dan 60% untuk nelayan di laut. Porsi 60% nelayan dibagikan kepada 20 nelayan yang terhubung ke laut. Keuntungan dibagikan kepada para nelayan sesuai dengan tugasnya di kapal di laut sesuai Tabel 1. Awak kapal (15 orang) hanya menerima 1/15 bagian (bagian 60% dikurangi bagian 40%). penyangga bangku). Dalam hal ini, pawang terkadang mendapatkan bonus tambahan untuk waktu bangku juga. Sistem bagi hasil ini jelas sangat bermanfaat bagi presiden atau pemegang saham. Pendapatan nelayan atau ABK tidak sebanding dengan waktu melaut dan bervariasi tergantung jumlah ikan yang ditangkap dan harga jual ikan.

Selama musim penangkapan ikan dari Desember hingga Maret, 2 ton ikan ditangkap per hari. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan perahu bervariasi mulai dari Rp. 50.000/hari menjadi Rp. 100.000/hari dan nelayan melaut hanya 5 hari dalam seminggu. Jika rata-rata pendapatan mingguan nelayan pengungsi minimal Rp. 35.714,29/hari, s/d Rp. 71.428,57/hari. Dengan asumsi jumlah anggota keluarga 5 orang, maka penghasilan minimal adalah Rp. 7.142,86 per orang per hari dan maksimal Rp. 14.285,71 per orang per hari atau Rp. 428.571,30 per penduduk per bulan. Pendapatan nelayan berada di bawah garis kemiskinan dan termasuk kategori termiskin. Garis kemiskinan di provinsi Aceh adalah Rp 454.740/kapita/bulan pada tahun 2018 (BPS, 2018)

Kegiatan pengolahan atau penangkapan ikan dalam agribisnis seperti pembekuan, perlakuan panas, penggaraman dll. serta pengemasan masih sangat sedikit dilakukan di wilayah Aceh Timur. Ikan tersebut sebagian besar dijual segar di luar wilayah kabupaten tanpa pengolahan lokal bahkan diekspor ke Malaysia, sehingga nilai tambah subsektor perikanan relatif rendah. Hanya sebagian kecil yang diolah menjadi ikan asin, ikan galah, ikan giling, terasi/belaca dan ikan pindang presto, apalagi saat harga jual ikan tersebut mengalami penurunan. Selama ini kegiatan pengolahan masih pada tataran agribisnis domestik dan tradisional, belum ada unit pengolahan modern atau investasi skala usaha. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Timur berpeluang mengeksport hasil perikanan langsung dari pelabuhan ke negara-negara Uni Eropa karena pelabuhan perikanan Nusantara Idi telah disertifikasi oleh Uni Eropa.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Menciptakan peluang kerja alternatif sebagai sumber pendapatan kedua bagi keluarga, (2) Mendekatkan masyarakat pada sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme swadana, (3) Mendekatkan masyarakat pada sumber teknologi baru yang akan dikembangkan. lebih sukses. dan kekuatan (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar dan (5) membangun solidaritas dan aksi kolektif dalam masyarakat (Nikijulw, 2001). Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur memberikan dampak positif bagi perikanan tangkap diantaranya adalah peningkatan infrastruktur di Minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, peningkatan peluang dan infrastruktur penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, peningkatan Kualitas dan kuantitas perikanan. sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan modal dan investasi (Jamilah dan Mawardati, 2017a). Berbagai permasalahan muncul dalam pelaksanaan program Minapolitan, seperti: B. Model bisnis tradisional, kurangnya investasi dan pengetahuan dalam industri pengolahan ikan sehingga banyak ikan yang dipasarkan dalam bentuk segar, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, terbatas Bagaimana akibatnya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Minapolitan menurun -Area tidak bertambah secara signifikan (Jamilah dan Mawardati, 2017b).

Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan sumberdaya Ikan

Sumber daya perikanan meliputi sumber daya budidaya dan sumber daya ikan laut. Perikanan budidaya adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir untuk memperoleh berbagai jenis ikan, kerang, ganggang dan biota laut lainnya yang mempunyai nilai ekonomi penting (Triarso, 2004). Potensi ikan lestari setidaknya sekitar 6,17 juta ton per tahun, di mana 4,07 juta ton di perairan Indonesia, yang baru dimanfaatkan 38 persen, dan 2,1 juta ton per tahun di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemanfaatan potensi ini juga baru 20 persen (Dahuri, 2002). Keberlanjutan perikanan tangkap terancam oleh overfishing yang ditandai dengan penurunan hasil tangkapan ikan dan penurunan hasil tangkapan dari tahun ke tahun (Triarso, 2012).

Pemanfaatan sumber daya tangkapan meliputi keterlibatan nelayan dalam penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta kemampuan menangkap untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan program Minapolitan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nelayan adalah pekerja aktif yang mencari nafkah dengan mencari ikan di laut dan tidak menutup kemungkinan untuk mencari nafkah lain.

Pemanfaatan potensi laut dan hasil tangkapan diukur dengan kapasitas penangkapan ikan. Menurut Wiyono (2005), kapasitas penangkapan mengacu pada kemampuan input penangkapan ikan (satuan kapal) yang akan digunakan untuk menghasilkan output (tangkapan), diukur dalam satu unit penangkapan ikan atau dalam produksi alat tangkap lainnya. Kemampuan tersebut bergantung pada jumlah sumberdaya ikan yang ditangkap (baik musiman maupun tahunan) dan kemampuan penangkapan ikan itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, overcapacity diterjemahkan menjadi suatu keadaan dimana overcapacity input penangkapan ikan (armada penangkapan ikan) digunakan pada tingkat tertentu untuk menghasilkan produksi perikanan (fishing). Overcapacity yang terus-menerus pada akhirnya menimbulkan overfishing, yaitu kondisi dimana hasil tangkapan ikan (catches) melebihi plafon. Dari seluruh daerah di Provinsi Aceh, subsektor perikanan Kabupaten Aceh Timur memiliki upaya penangkapan ikan yang paling tinggi. Pada tahun 2014, produksi perikanan laut dan umum yang didominasi Kabupaten Aceh Timur lebih tinggi (16.018,9 ton) dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Aceh, namun pada tahun 2015 produksinya turun menjadi 10.027,4 ton, menempati posisi yang sama di urutan keempat setelah kabupaten. Aceh Selatan (18.479,4 ton), Bireuen (16.494,3 ton) dan Langsa (14.195,3 ton) (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016). Potensi perikanan Provinsi Aceh sebesar 272,2 ribu ton per tahun. Pada tahun 2016, pemanfaatan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur hanya sebesar 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Provinsi Aceh.

Tabel2 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014-2016

No	Perikanan Laut	Produksi (Ton)			Nilai Produksi (Rp. 000)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Ikan	21.805,7	20.031,3	27.474,3	420.940.189,0	392.012.679,3	599.565.982,3
2	Udang	123,6	181,4	173,1	5.573.940,0	6.892.555	8.837.325
3	Binatang berkulit keras	19,01	41,9	12,1	381.480,0	837.754	277.288
4	Binatang berkulit lunak	50,2	57,4	0	1.255.875,0	1.435.225	0
Jumlah					428.151.484,0	401.178.213,3	608.680.595,3

Sumber: Aceh Timur Dalam Angka, 2017.

Produksi dan nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Aceh Timur bervariasi antara tahun 2014 dan 2016 (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil perikanan laut belum maksimal. Mengacu pada PT. Menurut Central Data Meditiamia Indonesia (CDMI) Consulting, kondisi perikanan setempat telah membaik selama 6 tahun terakhir, yang tercermin dari peningkatan produksi, baik produksi tangkapan maupun budidaya, dengan pertumbuhan rata-rata 20% per tahun. Tahun 2011 perkembangan produksi perikanan budidaya sebesar 6,47 juta ton, tahun 2016 sebesar 19,75 juta ton, sedangkan penangkapan ikan tahun 2011 sebesar 5,71 juta ton dan tahun 2016 sebesar 27,66 juta ton. Hingga akhir tahun 2016, nilai produksi perikanan Indonesia mencapai Rp. 608,68 miliar.

Perikanan laut Kabupaten Aceh Timur terdiri dari ikan, udang, krustasea dan hewan berkulit dengan nilai produksi berkisar antara Rp401.178.213,3 sampai dengan Rp608.680.595,3. Produksi ikan dominan 16.389.481 ton, termasuk jenis ikan; Kite Deles, Cob Como, Cakalang, Yellowfin, Selar, Cob Krai, Keblo dan Lisong. Pada tahun 2016 produksi ikan sebesar 27.474,3 ton dan rata-rata produksi ikan per hari sebesar 88,06 ton/hari. Jumlah nelayan sebanyak 13.212 orang, sehingga rata-rata produksi nelayan adalah 6,67 kg/hari. Jika kita asumsikan harga jual rata-rata ikan adalah Rp. 10.000/kg (harga jual tuna per kilogram di tingkat nelayan), rata-rata pendapatan nelayan adalah Rp. 66.700/hari. Jika diasumsikan jumlah anggota keluarga 5 (lima) orang, maka pendapatan per orang per hari adalah Rp13.340/kapita/hari atau Rp. 346.840/penduduk/bulan. Pendapatan nelayan Rp. 346.840/orang/bulan yang berada di bawah garis kemiskinan GPS tahun 2016 sebesar Rp. 415.826/orang/bulan dan termasuk kategori termiskin.

Tabel 3 Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015-2016

No.	Kecamatan	Produksi Perikanan Laut (Ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Birem Bayeun	34,01	44,46
2	Rantau Selamat	38,58	53,82
3	Sungai Raya	95,86	99,16
4	Peureulak	542,00	677,83
5	Peureulak Timur	19,03	34,03
6	Idi Rayeuk	16.874,282	23.738,11
7	Peudawa	170,76	187,18
8	Darul Aman	1.801,93	1.725,59
9	Nurussalam	133,56	158,62
10	Julok	470,51	528,99
11	Simpang Ulim	180,55	183,28
12	Madat	39,01	43,22
Kabupaten Aceh Timur		20.031,34	27.474,29

Sumber: Aceh Timur Dalam Angka, 2017.

Tabel 3 menunjukkan peningkatan produksi ikan yang cukup besar pada tahun 2016 yaitu 37,16% (27.474,29 ton) dibandingkan tahun 2015 (20.031,34 ton). Hal ini menandakan bahwa ekosistem berfungsi dengan baik atau pemulihan spesies ikan tersebut masih baik. dan didukung oleh Program Pembangunan Kawasan Minapoli yang disponsori oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Semakin baik fungsi ekosistem, semakin rendah risiko/ancaman tidak langsung terhadap keberlanjutan (Hartono et al. 2005).

Perikanan laut kabupaten Idi Rayeuk (kawasan Minapolitan) menyumbang 86,40% dari total perikanan laut kabupaten Aceh Timur menurut kecamatan. Produksi ikan yang dominan di Kecamatan Idi Rayeuk adalah flying dales, seperti kobo, bonito, madidihang, selar, kobkrai, tengiri dan lisong. Hal ini didukung infrastruktur berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan lembaga perikanan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan kawasan Minapoli di kawasan ini bertumpu pada penangkapan ikan. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Laut Nusantara (PPN) di kawasan Idi Rayeuk menjadikan kehidupan nelayan terpusat pada segala aktivitas penangkapan ikan seperti melaut. B. Membeli Alat Pancing (Unit Suplai Bahan Bakar, Tanaman Es dan Alat Pancing). , memancing (yang memisahkan nelayan dari memiliki penangkapan ikan). , perbaikan jaring, pengolahan ikan dan pemasaran ikan.

Data UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk menunjukkan bahwa produksi ikan segar sebagian besar dipasarkan di luar Kabupaten Aceh yaitu sebesar 60% ikan segar, sisanya dipasarkan di wilayah Aceh Timur (Tabel 4). Ikan yang dipasarkan di Medan di provinsi Sumatera ini ditujukan untuk ekspor ke Malaysia dan menyumbang 30% dari total produksi di wilayah Aceh Timur.

Tabel 4 Data Pemasaran Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, Tahun 2015

No	Tujuan Pemasaran	Jumlah Ikan (Kg)	Persentase (%)
1	Lokal (dalam Kabupaten Aceh Timur)	6.749.713	40
2	Luar Kabupaten Aceh Timur	10.124.570	60
	Banda Aceh	337.486	2
	Lhoksukon	168.743	1
	Pantonlabu	168.743	1
	Langsa	168.743	1
	Kuala Simpang	168.743	1
	Takengon	506.228	3
	Sibolga	337.486	2
	Medan	5.062.285	30
	Padang	1.687.428	10
	Jambi	843.714	5
	Riau	674.971	4
	Total	16.874.283	100

Sumber: UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk, 2015

Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Sarana Perikanan

Dalam mengembangkan perikanan tangkap, perhatian harus diberikan pada ketersediaan sumber daya ikan dan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan dan pelelangan ikan. Dalam mengembangkan Kalasatama harus diperhatikan keberadaan nelayan dan tersedianya pengolahan yang layak seperti cold storage, SPBU dan listrik. Untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya ikan, maka jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan harus ditentukan (Adam, 2012).

Eksploitasi potensi kelautan dan perikanan di perairan Kabupaten Aceh Timur diperkirakan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur seperti green ship dan perikanan tangkap. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, pemerintah kabupaten hanya mengelola wilayah laut dalam jarak 0-12 mil. Di kawasan ini, nelayan bisa mengeksplorasi hasil laut. Selain itu, menurut Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia Tahun 2004 sudah No. 31. Eh tidak. 45 Tahun 2009, pengelolaan perikanan mencakup serangkaian tugas kompleks yang bertujuan untuk memastikan hasil yang optimal bagi masyarakat lokal, daerah, dan negara dari sumber daya alam yang dicapai melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Jumlah armada penangkapan ikan pada tahun 2016 sebanyak 3.163 unit yang terdiri dari 554 kapal tidak bermotor, 1.047 kapal motor tempel dan 1.562 kapal motor (Tabel 5). Armada kapal motor nelayan yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Idi terdiri dari berbagai ukuran < 5GT hingga 90GT. Jumlah nelayan sekitar 13.216 orang, sehingga diperkirakan 10.053 nelayan atau 76,07 persen nelayan tidak memiliki armada penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan adalah ABK. Kedudukan nelayan dalam usaha perikanan menentukan tingkat pendapatan seorang nelayan.

Tabel 5 Jenis Armada Tangkap di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014-2017

Jenis Armada Tangkap	Tahun		
	2014	2015	2016
Perahu tanpa motor	554	554	554
Perahu motor temple	885	713	1.047
Kapal motor	1.481	1.486	1.562
Jumlah	2.700	2.753	3.163

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

Sifat harta penangkapan mengacu pada keuntungan dari kegiatan penangkapan ikan. Perikanan dimiliki oleh pemilik lokal, pemilik lokal dan non-lokal, dan pemilik non-lokal yang berinvestasi dalam bisnis perikanan di daerah tersebut. Jenis kepemilikan perikanan ini tidak hanya menunjukkan profitabilitas, tetapi juga tingkat kemandirian masyarakat pesisir dari kepemilikan asing terhadap perikanan mandiri. Ketika masyarakat pesisir lebih diuntungkan, masyarakat pesisir cenderung lebih mendukung keberlanjutan perikanan tangkap (risiko/ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya tangkap lebih rendah) (Hartono et al., 2005).

Tabel 6 Data Perkembangan Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Idi Tahun 2015

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah alat tangkap (unit)	
		2014	2015
1	Jaring insang (Gill Net)	62	65
2	Pancing	52	65
3	Mini Purse seine	75	75
4	Purse seine	150	160
TOTAL		334	365

Sumber: UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, 2015.

Informasi tentang perkembangan jumlah tangkapan sejalan dengan penambahan armada penangkapan ikan. Tabel 6 menunjukkan bahwa alat tangkap yang tersedia di Pelabuhan Perikanan Idi sebagian besar adalah tiang dan pukat. Evolusi jumlah tangkapan ditunjukkan pada Tabel 6. Kapasitas penangkapan mencerminkan ukuran perikanan. Kapasitas penangkapan ikan ditentukan oleh ketersediaan armada, alat tangkap dan infrastruktur penangkapan ikan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan Minapolitan dari perspektif industri perikanan yang berbeda membutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Hasil kajian Suryawati dan Purnomo (2011) menunjukkan bahwa aspek ekologi, ekonomi, teknologi dan infrastruktur tidak berkelanjutan, aspek sosial budaya cukup berkelanjutan, aspek politik, hukum dan kelembagaan sangat berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan yang terlibat belum maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat eksploitasi sumber daya ikan di wilayah administratif Aceh Timur belum maksimal, hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari provinsi Aceh. Produksi ikan 27.474,3 ton/tahun dan rata-rata produksi ikan nelayan 6,67 kg/hari. Pajak penghasilan nelayan untuk kebutuhan rumah tangga adalah Rp13.340/penduduk/hari atau Rp. 346.840/penduduk/bulan. Pendapatan nelayan berada di bawah garis kemiskinan dan termasuk kategori termiskin.
2. Kapasitas penangkapan ikan ditentukan oleh ketersediaan armada, alat tangkap dan infrastruktur penangkapan ikan. Diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 persen nelayan tidak memiliki armada penangkapan ikan. Peningkatan armada penangkapan ikan melalui program Minapolitan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal.

Saran

1. Program Minapolitan harus terus dilaksanakan dengan memperluas infrastruktur dan industri perikanan, memberikan bantuan peluang penangkapan ikan, memfasilitasi akses kredit bagi nelayan dan memberdayakan nelayan (pelatihan dan keterampilan pengolahan ikan, penggerakan partisipasi nelayan). nelayan, bengkel perikanan) untuk mengentaskan kemiskinan nelayan di daerah tersebut. pantai Aceh .
2. Integrasi yang sinergis antara pemerintah daerah, swasta, perbankan, LSM lokal dan asing merupakan pilar utama bagi pengembangan pertanian perikanan di Kabupaten Aceh Timur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. masyarakat, menciptakan nilai produk, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi keresahan sosial di masyarakat, dan meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 2(2):115-126.
- [BPS] Badan Pusat Statistik 2018. *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013 – 2018*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016. *Aceh Dalam Angka, 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017. *Aceh Timur Dalam Angka, 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Langsa.
- Dahuri, R. 2002. *Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Indonesia*. PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Laporan Tahunan Program Minapolitan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi, A., and S. Anna. 2002. *Assessment of fishery resource depreciation for policy considerations*. *Journal of Coastal and Marine Resources* 4(2):36-49.

- Hartono. et al. 2005. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Perikanan*. 6(1): 65-76.
- Indrianingsih, S.K dan K.M. Noekman. 1995. Identifikasi Penduduk Miskin Di Jawa Timur. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian Kemiskinan di Pedesaan. *Pusat Penelitian Agro Ekonomi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Jamilah. 2015. Analisis Ketidakpastian Pendapatan Nelayan Aceh. *Jurnal E-Mabis*. 16(1): 120- 127.
- Jamilah dan Mawardati. 2017a. Program Minapolitan dan Peranannya Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*. 16(1): 162-170.
- Jamilah and Mawardati. 2017b. *Opportunity and Constraints of Development of Fishery Minapolitan Regency of East Aceh District. The Prosiding of Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies (MICoMS)*. Institute of Research and Community Service. Malikussaleh University. Lhokseumawe – Aceh.
- [KKP]. 2011. *Pedoman Umum Minapolitan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Muhammad, S. 2002. Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Di Jawa Timur: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.
- Suryawati SH dan AH Purnomo. 2011. Analisis ex-ante Keberlanjutan Program Minapolitan. *J. Sosek KP*. 6(1): 61-81.
- Triarso, I. 2004. *Study on Total Allowable Catch Determination. Coastal Community Developmnet and Fisheries Resources Management Project Central Java. Directorat General of Capture Fisheries, Ministry Affairs and Fisheries*, Jakarta.
- Triarso, I. 2012. Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Saintek Perikanan*. 8(1): 186-197.
- UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, 2016. *Laporan Tahunan 2015*. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Idi Rayeuk.
- Wiyono ES. 2005. *Perspektif Baru dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan*. Edisi Vol. 3/XVII/Maret 2005 – Nasional.[terhubung berkala]. [http.io.ppi-jepang.org/article.php](http://io.ppi-jepang.org/article.php).

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pdfs.semanticscholar.org

Internet Source

3%

2

drgorilla.gr

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off